

## IDENTITAS BUDAK DI DUNIA MELAYU

*Anatona\**

### ABSTRACT

Slaves emerged and were found in many places of the world including Malay. They existed in some ethnic-groups that settled in some areas in Sumatera and the Malay Peninsula. In fact, they had been integrated into the structure of the Malay society. This article aims to discuss one of the aspects of the slave identity that existed in Malay in the 19<sup>th</sup> century. The aspect which will be discussed is the characteristics based on symbols embedded in them.

**Key Words :** budak, identitas budak, sejarah, dunia Melayu, Sumatra, Semenanjung Malaya.

### PENGANTAR

Eksistensi budak (hamba) adalah sebuah realitas historis. Budak merupakan salah satu warisan tertua peradaban masa lalu umat manusia. Selain sudah berlangsung dalam periode waktu yang sangat lama, keberadaan budak bersama institusi perbudakan merupakan sebuah fenomena umum yang hampir merata ditemukan pada berbagai komunitas, termasuk komunitas masyarakat di dunia Melayu.

Budak dan institusi perbudakan di dunia Melayu tidak hanya terdapat pada masyarakat pendukung kebudayaan Melayu semata, melainkan ditemukan pula pada masyarakat pendukung kebudayaan lain. Hal ini disebabkan masyarakat dunia Melayu bersifat heterogen dalam berbagai aspek seperti etnisitas dan kultural yang di dalamnya tercakup berbagai macam sistem. Selain itu, masyarakat dunia Melayu adalah masyarakat yang aktif bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dalam satu pulau maupun antarpulau. Mobilitas geografis penduduk telah menyebabkan terjadinya proses adaptasi dan integrasi di dalam masya-

rakat. Semua ini berpengaruh terhadap keberadaan institusi perbudakan.

Sosok budak di dunia Melayu ditemukan dalam dua tipe komunitas, yaitu pada komunitas masyarakat etnis yang homogen dan pada komunitas masyarakat majemuk. Tidak ada pengecualian, apakah masing-masing komunitas masyarakat tersebut secara politik berada di bawah pengaruh dari sebuah pemerintahan sebuah negara dan kerajaan besar yang kuat atau justru hanya berada di bawah pemerintahan sebuah kekuasaan lokal yang kecil, terbatas, dan relatif lemah. Sementara itu, secara geografis, institusi perbudakan menyebar di berbagai wilayah, baik di pedalaman maupun di bandar-bandar niaga pesisir pantai.

Tulisan ini memaparkan salah satu aspek sosok budak di dunia Melayu pada sejumlah kawasan di Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya dalam kurun waktu abad ke-19. Pokok permasalahan dalam tulisan ini terfokus pada persolan identitas budak. Inti pertanyaan ialah bagaimana sesungguhnya ciri-ciri atau identitas budak di dunia Melayu? Identitas budak perlu

---

\* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Andalas.

diungkap mengingat studi-studi pendahuluan tentang budak biasanya berawal dari persoalan jati diri. Identitas budak penting pula dikenali untuk memperoleh pengetahuan di tengah-tengah masih minimnya referensi yang berkaitan dengan terminologi budak di dunia Melayu.

## STRATA BUDAK

Munculnya komunitas budak di dunia Melayu khususnya di Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya, tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang ada di masing-masing wilayah, tempat budak itu berada. Di beberapa bagian dunia Melayu terdapat institusi perbudakan. Tradisi dan adat-istiadat pada sejumlah masyarakat lokal menyediakan ruang bagi terbentuknya institusi tersebut.

Institusi perbudakan yang terdapat pada masyarakat yang bermukim di berbagai kawasan dunia Melayu, baik pada masyarakat pendukung kebudayaan Melayu itu sendiri maupun masyarakat pendukung kebudayaan lain, memperlihatkan beberapa kemiripan. Sebuah kemiripan yang dapat diamati ialah stratifikasi atau lapisan sosial yang ditempati oleh golongan budak. Budak menempati strata atau lapisan tersendiri di dalam struktur masyarakat yang bermukim pada beberapa kawasan dunia Melayu. Hingga abad ke-19, stratifikasi masyarakat di beberapa bagian wilayah di Pulau Sumatra seperti *Padangsche Bovenlanden* (Dataran Tinggi Padang), Tapanuli, Riau, Sumatra Timur, dan beberapa Negeri Melayu di Semenanjung Malaya seperti Malaka, Perak, dan Selangor, menempatkan golongan budak menjadi sebuah strata tersendiri, terlepas dari strata-strata yang lain.

*Hatoban* dalam bahasa Batak-Toba dan Mandailing, *jabolon* dalam bahasa Batak-Simalungun di Tapanuli, hamba dalam bahasa Melayu, *kawan* dalam bahasa Batak-Karo dan diucapkan pula oleh penutur bahasa Melayu di Perak (Maxwell, 1890:248; Gullick, 1965:97), dan *kamanakan di bawah lutuik* dalam bahasa Minangkabau, semuanya merupakan istilah-istilah khas yang terdapat dalam bahasa-bahasa daerah setempat yang secara umum pengerti-

annya mengacu kepada budak. Istilah-istilah ini dipakai sebagai sebutan yang diperuntukkan dan ditujukan kepada golongan budak yang terdapat pada masing-masing komunitas masyarakat tersebut.

Secara umum, strata budak berada di bawah strata rakyat biasa atau rakyat kebanyakan. Posisi *jabolon* di dalam sistem pelapisan sosial masyarakat Batak-Simalungun, misalnya, berada di bawah lapisan *paruma* (rakyat biasa). Di atas *paruma* masih ada dua strata lagi. Strata paling atas ditempati oleh golongan raja sebagai penguasa, kemudian diikuti oleh strata *partuonan*, meliputi keluarga dekat atau orang yang mempunyai ikatan darah dengan raja yang tinggal di daerah-daerah taklukan.

Lapisan *jabolon* masih terbagi lagi menjadi enam, yaitu 1) *jabolon taban*, yaitu budak yang tertangkap dalam pertempuran, termasuk perempuan dan anak-anak; 2) *jabolon tangga* atau *jabolon pusaka*, yaitu budak yang diwariskan turun temurun; 3) *jabolon bolian*, yaitu budak yang ditebus oleh seorang majikan dari majikan lainnya; 4) *jabolon marutang*, yaitu budak yang tidak mampu membayar hutang atau denda (Vergouwen, 1964:327); 5) *jabolon ajapan*, adalah budak yatim-piatu; dan 6) *satonga jabolon*, yaitu budak yang disetujui oleh majikannya menikah dengan laki-laki atau perempuan merdeka (Kroesen, 1904:573).

Sama seperti yang terjadi di wilayah Tapanuli bagian utara seperti Toba dan Simalungun, masyarakat Tapanuli Selatan di Angkola, Sipirok, Padang Lawas, dan Mandailing juga memiliki strata budak. Strata masyarakat paling atas pada distrik-distrik tersebut disebut *namora-mora*, yaitu kelompok bangsawan dan penguasa. Strata ini terdiri dari para keturunan pendiri kampung yang berpengaruh. Lapisan kedua disebut *anggi ni raja*, yaitu kelas setengah bangsawan. *Anggi ni raja* adalah golongan dari keturunan *namora-mora* yang menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Strata ketiga disebut *halak na bahaf*, yaitu rakyat biasa. Pada ujung ekstrem yang lain terdapat strata budak yang disebut *hatoban*, sama persis dengan istilah yang dipakai di wilayah Toba.

Perhitungan jumlah budak di Tapanuli yang paling awal diperoleh dari catatan organisasi dagang Inggris EIC (*English East India Company*) dalam *Sumatra Factory Records* yang menyebutkan jumlah budak di wilayah Tapanuli dan Natal pada tahun 1778 sebanyak 55 orang (SFR No. 1246-1316). Pada tahun 1840, dilaporkan bahwa sepertiga dari rata-rata jumlah penduduk sebuah kampung di Sipirok dan Angkola Tapanuli Selatan yang mencapai 200 jiwa, dan di Mandailing sebanyak 350 – 400 jiwa, adalah budak (Castles, 2001:15). Jumlah budak di Tapanuli kemudian diperoleh pula berdasarkan hasil perhitungan penduduk yang dilaksanakan pada tahun 1851. Hasil perhitungan mengungkap bahwa pada tahun 1851 di sana terdapat sebanyak 7.093 orang budak. Angka ini hampir mendekati 9% dari total keseluruhan penduduk Keresidenan Tapanuli pada waktu itu yang berjumlah sebanyak 82.248 orang (Couperus, 1855:234).

Pada pertengahan abad ke-19, jumlah budak di Keresidenan Tapanuli mengalami peningkatan. Dalam tahun 1855, Asisten Residen A.P. Godon, yang bertugas selama sepuluh tahun dari 1847 hingga 1857 di distrik Mandailing dan Angkola, melaporkan jumlah budak pada kedua wilayah tersebut mencapai 7.976 orang. Sebanyak 5.344 orang budak terdapat di Mandailing, dan sisanya 2.632 orang budak terdapat di Angkola (Godon, 1862:26). Jumlah budak pada dua distrik di Tapanuli Selatan ini saja telah melebihi perhitungan sensus untuk seluruh wilayah Keresidenan Tapanuli yang dibuat pada tahun 1851 seperti di atas.

Arah selatan Tapanuli memasuki wilayah yang dihuni oleh suku bangsa Minangkabau. Meskipun stratifikasi masyarakat Minangkabau yang mendiami sebagian kawasan barat dan tengah Pulau Sumatra dipercayai tidak terbagi secara tegas (Loeb, 1972:107), namun masyarakat Minangkabau yang bermukim di Keresidenan *Padangsche Bovenlanden*, juga mengenal strata budak.

Golongan budak di Minangkabau dapat dibagi menjadi 3 kategori. Masyarakat Minangkabau yang bermukim di Keresidenan *Padang-*

*sche Bovenlanden* menggunakan istilah *laci* untuk menyebut budak dalam artian sesungguhnya. Kategori yang lain disebut dengan istilah budak *pusako*. Budak *pusako* adalah budak yang diwariskan secara turun temurun. Yang terakhir adalah kategori budak dengan sebutan *kamanakan di bawah lutuik* (Pistorius, 1868:436; Willinck, 1909:144; Kato, 1989:48). *Kamanakan di bawah lutuik* merupakan kategori budak dengan jumlah paling banyak bila dibandingkan dengan yang lainnya.

Keberadaan budak yang mencakup tiga kategori di atas, tersebar pada lima *afdeeling* (wilayah administrasi setingkat kabupaten), masing-masing *afdeeling* Tanah Datar, *afdeeling* XIII dan IX Koto, *afdeeling* Agam, *afdeeling* Batipuh dan X Koto, dan *afdeeling* Limapuluh. Pada tahun 1876, jumlah budak yang ada di lingkungan *afdeeling* Tanah Datar saja, tidak kurang dari 5.893 orang (KV van 1876).

Sejak tahun 1862, Inggris yang telah berhasil menguasai Negeri-negeri Selat yakni Malaka, Penang, dan Singapura (*Straits Settlements*) mulai meluaskan pengaruhnya memasuki negeri-negeri di Semenanjung Malaya. Dibutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk memasukkan beberapa kerajaan lokal ke bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Pada tahun 1874, para administrator pemerintahan Inggris sudah mulai menjalankan tugas-tugasnya di Semenanjung Malaya sebagai wilayah koloni yang baru. Saat pegawai-pegawai administrasi Inggris ini masuk, mereka juga bertemu dan menyaksikan keberadaan hamba dan institusi perhambaan di beberapa negeri Semenanjung Malaya, khususnya Perak (Gullick, 1965:99).

Berdasarkan masa pengabdianya, lapisan hamba yang terdapat pada masyarakat Perak di Semenanjung Malaya terbagi menjadi dua. Pertama, hamba mengiring, yaitu budak yang sepenuhnya mengabdikan seluruh hidupnya kepada tuan, pemilik, atau majikannya. Inilah budak yang sesungguhnya yang disebut sebagai hamba atau abdi di Perak. Kedua, hamba berbelah, yaitu hamba yang mengabdikan sebagian waktunya kepada tuannya. Hamba berbelah seringkali disebut dengan istilah kawan.

Pada tahun 1879, jumlah budak di Perak tercatat sebanyak 3.050 orang atau hampir 4% dari total penduduk Perak saat itu yang berjumlah sebanyak 81.084 jiwa (Maxwell, 1890; Aminuddin, 1966:2). Jumlah antara budak laki-laki dan budak perempuan di Perak cukup berimbang, yakni 1.503 orang laki-laki berbanding 1.547 orang perempuan. Angka sebanyak ini belum mengalami perubahan yang berarti hingga masa tiga tahun setelah itu. Pada tahun 1882, jumlah abdi atau orang berhutang di Perak masih sekitar 3000 orang (Maxwell, 1890:249; Sullivan, 1982:46).

## PENAMAAN

Malaka adalah sebuah bandar niaga terkemuka di pesisir barat Semenanjung Malaya. Sejak masih berada di bawah pemerintahan dinasti raja-raja Melayu pada abad ke-15, struktur masyarakat Malaka terbagi ke dalam beberapa lapisan termasuk strata budak. Penguasa dan penduduk Malaka, secara bersama-sama juga menerapkan praktik-praktik perbudakan. Praktik perbudakan di Kerajaan Malaka baik yang terdapat di lingkungan penguasa istana maupun di kalangan rakyat biasa berlangsung legal dan resmi.

Informasi awal yang menerangkan keberadaan budak di Kerajaan Malaka tertera dalam kitab Sejarah Melayu (Munsji, 1958:153). Budak milik para penguasa disebut sebagai budak negara atau budak kerajaan. Kategori budak milik penguasa Kerajaan Malaka dinamakan hamba raja atau abdi raja (Matheson dan Hooker, 1983: 182-208; Reid, 1993:64). Penguasa Kerajaan Malaka dapat memiliki budak dalam jumlah besar hingga mencapai ribuan orang. Pada penghujung kekuasaan Sultan Malaka yang terakhir tahun 1511, terdapat sekitar 1.500 hingga 3.000 budak milik sultan dan keluarga istana kerajaan (Manguin, 1983:210; Thomaz, 2000: 133).

Eksistensi budak dalam komunitas masyarakat Malaka sangat penting. Begitu pentingnya sehingga keberadaan mereka turut diatur secara hukum dan dimuat di dalam kitab Undang-undang Malaka (UUM), yakni kode hukum yang berlaku di Malaka pada waktu itu. Sebagai sebuah

kumpulan peraturan dan pedoman hukum, UUM sudah diterapkan di lingkungan Kerajaan Malaka sejak pertengahan abad ke-15. Setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511, undang-undang ini pun masih tetap dijalankan.

Ada tiga kategori budak yang disebut dalam teks UUM. Kategori pertama disebut budak biasa. Mereka dikenal sebagai hamba, abdi, dan *biduanda*. Kelompok *biduanda* menempati urutan terbanyak di antara budak-budak yang ada di Kerajaan Malaka. Kategori kedua disebut sebagai orang berhutang. Budak-budak dari kategori ini dapat memperoleh kemerdekaan setelah melunasi hutang-hutang mereka. Kategori ketiga disebut hamba raja. Budak pada kategori ini memperoleh perlindungan dari kerajaan. Orang-orang yang membunuh hamba raja akan menerima sanksi yang keras. Untuk menghindari sanksi hukuman mati yang akan dikenakan biasanya mereka rela menyerahkan dirinya sendiri untuk menjadi budak raja (Fang, 1976:40-1).

Tidak kurang dari 13 pasal di dalam UUM yang mengatur mengenai budak. Porsi ini cukup besar sehingga dapat dimaknai sebagai sinyal bahwa budak dan perbudakan merupakan salah satu unsur penting di dalam hukum ketatanegaraan Kerajaan Malaka. Pasal-pasal UUM yang memuat mengenai budak meliputi pasal 6(4); 7(1,2,3); 8(1,2,3); 10; 11(4); 12(1,2); 13(1,2); 15(1,2,3,5); 18(3); 23(2,3); 24(1); 28(3); dan 44 (2,3,6). Pasal-pasal ini setara kedudukannya dengan pasal-pasal lain yang terdapat di dalam UUM, seperti pasal mengenai prosedur jual beli, kriminal, dan perkawinan.

Setelah kekuasaan Malaka direbut Portugis dari tangan dinasti raja-raja Melayu, berabad-abad kemudian, tradisi perbudakan di Malaka terus berlanjut. Portugis dan beberapa negara Eropa lainnya, yakni Belanda dan Inggris yang secara silih berganti menguasai Malaka selama kurun waktu abad 16 hingga 19, menjalankan kebijakan tetap mempertahankan keberadaan budak dan menjalankan praktik-praktik perbudakan serta perdagangan budak di sana. Bahkan, keberadaan negara-negara kolonial Eropa tersebut justru makin menyuburkan praktik-praktik

perbudakan dan perdagangan budak. Pada saat setelah Portugis mengambil alih Malaka dari tangan raja-raja Melayu tahun 1511 misalnya, sekitar 2,5 hingga 5,5% dari 120.000 jumlah penduduk Malaka saat itu, terdiri dari budak (Thomaz, 2000).

Identitas budak di Malaka antara lain dapat diketahui dari nama-nama yang melekat pada sosok budak. Budak dapat teridentifikasi dengan cepat melalui nama-nama yang mereka sandang. Nama-nama budak tidak hanya sebagai sebuah sebutan atau panggilan, namun di balik itu terkandung pula sebuah simbol-simbol khusus. Sebagian besar nama-nama budak merupakan pemberian dari para pemilik budak bersangkutan. Pemilik budak memiliki kuasa dan hak penuh terhadap budak, termasuk hak untuk memberikan nama-nama kepada budak-budak yang mereka miliki. Biasanya nama-nama asli dari budak-budak yang diperjualbelikan pun diganti oleh para pemilik mereka yang baru (Gallop, 2003:9). Dalam proses pemberian nama, para pemilik budak tidak berusaha mencari nama-nama yang rumit bagi para budaknya, melainkan mereka hanya memilih nama-nama yang sederhana dan mudah diingat.

Banyak nama budak di Malaka yang diambil dari nama-nama bulan yang bersumber dari kalender, baik kalender tahun Kabisat, maupun kalender tahun Hijriah. Hampir semua nama bulan yang ada di dalam kalender tahun Kabisat dipakai sebagai nama budak. Nama-nama tersebut ialah Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Hanya satu nama bulan saja, yaitu Februari, yang tidak ditemukan penggunaannya. Sementara itu, nama-nama bulan yang terdapat di dalam kalender tahun Hijriah yang sering dipakai sebagai nama-nama budak ialah Muharam, Rajab, Syaban, dan Syawal.

Dari sebelas nama-nama bulan yang terdapat di dalam kalender tahun Kabisat dan empat nama bulan yang terdapat di dalam kalender tahun Hijriah, September adalah nama yang paling populer. Dibanding dengan nama bulan yang lain, September paling sering dipakai

sebagai nama budak. Nama September tidak hanya muncul di dalam dokumen-dokumen mengenai jual beli budak di Malaka, namun nama September pernah pula muncul dalam dokumen-dokumen jual beli budak asal Bugis di Afrika Selatan (Koolhof dan Ross, 2005:281-308).

Identitas lainnya berkaitan dengan pemakaian nama-nama hari. Sebagian budak yang terdaftar di Malaka, menggunakan pula nama-nama hari sebagai nama mereka. Terdapat lima di antara tujuh nama hari yang ada yang sering muncul sebagai nama-nama budak. Nama-nama tersebut ialah Senin, Raboo (Rabu), Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Asal-usul budak dapat dilacak dalam kata *casta* yang tercantum di dalam nota-nota jual beli budak. Kata *casta* dalam bahasa Belanda dapat di padankan maknanya dengan kata *casta* dalam bahasa Portugis (Raben, 1996:334) atau *caste* dan *lineage* dalam bahasa Inggris, yang berarti garis keturunan atau garis asal. Mayoritas budak di Malaka berasal dari bermacam-macam etnis yang ada di Nusantara. Data-data registrasi budak yang dilaksanakan selama tahun 1819 sampai 1824, menunjukkan bahwa budak-budak tersebut berasal dari puluhan etnis, antara lain Batak, Sumbawa, Makassar, Bali, Bugis, Minangkabau, Buton, Melayu, Lingga, dan Nias. Di antara nama-nama etnis, ternyata ada pula yang dipakai sebagai nama budak. Sejumlah budak tercatat dengan nama Batta, Bali, Sumbawa, Jambi, Siak, Bugis, dan Flores.

Bunga sering kali dianggap sebagai simbol seorang perempuan sehingga lazim dipakai sebagai nama. Identitas sebagian budak perempuan di Malaka dapat dikenal melalui penggunaan nama-nama bunga. Ada beberapa budak perempuan yang langsung menggunakan kata Bunga sebagai nama mereka, dan ada pula yang menggunakan nama beberapa jenis bunga tertentu. Nama-nama Melatie (Melati), Meloor (Melur), Tanjong (Tanjung), Kananga (Kenanga), Cempaka, Mawar, dan Jasmin adalah nama-nama yang sering dipakai oleh budak perempuan di Malaka sebagai nama mereka.

Selain fenomena-fenomena penamaan budak yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula penamaan budak yang dikaitkan dengan bentuk tubuh, rupa, atau warna kulit seseorang. Sejumlah budak terdaftar dengan nama Manees (Manis), Itam (Hitam), Mancung, Biroe (Biru), Kurus, Poeti (Putih), Lembang, Ribut, dan Alus (Halus). Di samping itu, terdapat pula nama-nama budak yang menyiratkan suatu keadaan baik yang diharap-harapkan. Nama-nama tersebut ialah Oentoeng (Untung), Laba, Selamat (Selamat), Mojoor (Mujur, Berkah, Salam, dan Nasip (Anatona, 2007).

Nama-nama budak yang agak aneh terdapat di pedalaman pulau Sumatra, yakni di Lontung, Samosir. Nama-nama budak yang ada di Lontung diketahui menggunakan nama-nama hewan peliharaan seperti kucing dan babi. Berdasarkan nama-nama budak yang diambil dari nama-nama hewan menunjukkan status budak memiliki jenjang yang terus-tenurun. Keturunan ketiga dari seorang *hatoban* di Lontung diberi nama *huting* (kucing). Kalau ada tamu-tamu raja Lontung yang berkunjung, budak tersebut harus mengeong dan menggaruk-garuk, menirukan suara dan cara-cara dari seekor kucing (W.B. Sidjabat 1982: 85). Raja Ompu Sojuao di Samosir menjadikan keturunan *hatoban* yang berasal dari tawanan perang sebagai "manusia kucing" di rumahnya. Jika ada tamu raja yang datang, manusia-manusia kucing ini merangkak secara diam-diam dan berusaha menarik perhatian tamu raja tersebut dengan cara mengeluarkan suara meong dan garukan kucing untuk mengais dan meminta sedikit makanan (Castles, 2001:12). Selanjutnya keturunan yang keempat dari seorang budak, yaitu anak dari *huting* makin menurunkan derajatnya. Keturunan keempat disebut sebagai babi. Sama seperti tingkah laku yang diperlihatkan oleh kucing, perilaku seorang budak yang disebut terakhir, juga disesuaikan dengan perilaku seekor babi (Sidjabat 1982:85).

## TEMPAT TINGGAL

Identitas budak di Minangkabau dapat diketahui berdasarkan simbol tempat tinggal atau

rumah. Seorang budak atau tidak, dapat diketahui melalui bubungan atap rumah yang mereka tempati. Simbol bubungan atap rumah terdapat pada masyarakat Minangkabau yang bermukim di Keresidenan *Padangsche Bovenlanden*. Pada tahun 1868, dalam sebuah kunjungannya ke *nagari* (negeri, distrik) Silungkang dan *nagari* Padang Sibusuk, *onderafdeling* VII Kota Sijunjung, Keresidenan *Padangsche Bovenlanden*, kontrolir Belanda Verkerck Pistorius melaporkan rumah-rumah di kedua *nagari* tersebut banyak dihuni oleh para budak yang menyandang status *kamanakan di bawah lutuik*. Bubungan-bubungan atap rumah yang dihuni oleh budak di kedua *nagari* tersebut tidak bergonjong, berbentuk seperti tanduk (Pistorius, 1868: 438; Kerckhoff 1891:746).

Tanduk merupakan simbol yang penting dalam masyarakat dan kebudayaan Minangkabau. Menurut sebuah legenda, istilah Minangkabau pada awalnya berasal dari kata menang kerbau. Kata ini diabadikan dari peristiwa serangan Kerajaan Majapahit ke salah satu wilayah kekuasaan orang Melayu di Pulau Sumatra yang kemudian hari dikenal dengan nama Kerajaan Minangkabau. Serangan frontal pasukan Majapahit dapat dihindari dengan cara mengadakan pertarungan adu kerbau. Kemenangan ternyata berpihak kepada orang Melayu, setelah kerbau mereka mampu mengalahkan kerbau milik pasukan Majapahit (Loeb, 1972:97).

Para budak di *Padangsche Bovenlanden* tidak diizinkan membuat bubungan atap rumah mereka bergonjong meyerupai tanduk seperti yang lazim dipakai oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya. Bagi orang Minangkabau, tanduk merupakan sebuah simbol "heroik" ketika nenek moyang mereka berhasil mengalahkan pasukan Majapahit, sehingga simbol ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Kondisi rumah budak yang diamati oleh Pistorius diatur oleh hukum adat di Keresidenan *Padangsche Bovenlanden*, seperti kutipan di bawah ini:

*"Indak boleh mamakei nan patoet, roemahnja indak boleh bapoentjaq.... (Amran, 1985:299). (Tidak boleh memakai hal-hal yang patut, rumahnya tidak boleh berpuncak/bergonjong.)*

Selain dilarang membuat bubungan atap rumah mereka bergonjong, rumah yang dihuni budak juga tidak boleh berukuran lebar dan dilarang memiliki serambi. Di Bonjol, sebuah *nagari* yang menjadi pusat pertahanan kaum Paderi saat berlangsungnya Perang Paderi (1821-1837), bubungan rumah seorang budak dibuat dengan model *tungkui nasi* (bungkus nasi). Bungkus nasi yang sebenarnya di daerah ini dibuat dari daun. Sebuah rumah yang menggunakan bubungan berbentuk bungkus nasi merupakan simbol bahwa para penghuni rumah tersebut kalau makan biasa menggunakan daun sebagai tempat untuk menaruh dan membungkus nasi.

Seorang budak dapat pula dikenal melalui simbol anak tangga rumah yang mereka huni. Sebuah rumah di Tapanuli yang memiliki bilangan anak tangga genap seperti dua, empat, enam, delapan, atau sepuluh, tandanya dihuni oleh budak. Sebaliknya, jika bilangan anak tangga rumah tersebut hitungannya ganjil seperti tiga, lima, tujuh, sembilan, dan seterusnya, rumah tersebut tandanya dihuni oleh orang-orang bukan budak atau orang merdeka. Di Barumon Tapanuli Selatan, rumah seorang budak tidak dilihat berdasarkan jumlah anak tangga melainkan dari jenis bahan atau material yang dipakai untuk membuat sebuah tangga rumah. Tangga rumah yang dihuni oleh budak di Barumon terbuat dari bambu. Hanya orang merdeka saja yang diizinkan membuat tangga rumah mereka dari kayu.

## SIMPULAN

Identitas paling mencolok pada komunitas budak di dunia Melayu dapat dikenali melalui strata yang mereka tempati. Strata budak selalu saja ditempatkan pada urutan terbawah atau paling rendah di dalam struktur sosial. Realitas ini tidak berbeda dengan penempatan strata budak yang ada di berbagai tempat, di luar kawasan dunia Melayu. Budak yang menempati strata tersendiri kemudian diberi label atau simbol dengan istilah-istilah khusus. Pemberian istilah ini tidaklah sama. Penamaan sangat tergantung

dengan peristilahan yang terdapat dalam perbendaharaan bahasa dari masing-masing etnis dan pendukung kebudayaan, tempat budak itu berada.

Identitas budak juga dapat diketahui melalui nama-nama yang mereka sandang. Hingga awal abad ke-19, nama-nama budak di Malaka yang tertulis dalam bahasa Melayu, umumnya menggunakan satu suku kata saja. Nama-nama bulan, hari, bunga, etnis, keadaan yang diharapkan, dan nama-nama yang menunjukkan ciri-ciri fisik seseorang, adalah simbol-simbol yang sederhana dan mudah diingat, sehingga banyak dipakai sebagai nama-nama budak. Penggunaan nama-nama tersebut kemungkinan besar berhubungan dengan peristiwa yang ada di sekitar budak. Nama bulan dan hari misalnya, dipakai sebagai pengingat ketika budak tersebut lahir, atau saat ia dibeli, sedangkan penggunaan nama berdasarkan ciri-ciri fisik dipakai karena budak tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan nama yang disandangnya.

Hubungan paling kentara terjadi pada budak-budak yang menggunakan nama etnis. Terdapat korelasi antara nama-nama budak yang menggunakan nama etnis dengan etnis asal mereka. Nama Batta misalnya, diberikan untuk budak yang berasal dari Batak, Bali untuk budak yang berasal dari Bali, Sumbawa diberikan kepada budak yang berasal dari Sumbawa, dan nama Jambi untuk budak etnis Melayu.

Lain halnya dengan penggunaan nama-nama bunga bagi kaum perempuan. Meski menyandang status budak, ternyata kaum perempuan cukup dihargai. Pemilik budak tidak mau memberi nama sembarangan kepada sebagian budak perempuan yang mereka miliki, tetapi justru diberi nama yang relatif bagus yang diambil dari nama-nama bunga. Pemakaian nama bunga erat kaitannya dengan fungsi seorang budak perempuan di Malaka. Selain untuk kepentingan di sektor domestik, budak perempuan di bandar ini memiliki pula fungsi seksual. Pemberian nama-nama bunga seakan-akan merefleksikan fungsi mereka yang terakhir ini.

Penamaan budak di bandar niaga pesisir pantai seperti Malaka ternyata bertolak belakang dengan penamaan budak di wilayah pedalaman seperti di Lontung Samosir, Tapanuli. Eksistensi budak di bandar niaga pesisir pantai lebih "dihargai" daripada budak-budak yang ada di daerah pedalaman. Bila di Malaka budak-budak diberi nama dengan nama-nama yang relatif baik, tidak demikian halnya di Lontung. Hal ini menunjukkan persepsi terhadap budak di daerah itu berbeda jauh dengan manusia. Budak tidak sejajar dengan manusia merdeka. Budak ditaruh di tempat yang sangat rendah. Antara budak dengan orang merdeka memiliki jarak yang sangat jauh. Budak-budak bahkan dianggap sama nilainya dengan hewan sehingga mereka layak diberi nama dengan menggunakan nama-nama hewan tertentu.

Indikator lainnya yang dapat menunjukkan identitas budak ialah tempat tinggal. Tempat tinggal budak bukan saja berfungsi sebagai rumah tempat berlindung, tetapi secara sosial, tempat tinggal budak dibedakan dengan tempat tinggal orang merdeka. Ternyata, tidak hanya kemerdekaan personal budak yang direnggut, tetapi juga kemerdekaan berekspresi mereka dalam kehidupan sosial. Berbagai macam simbol rumah seperti model bubungan, ukuran luas, jumlah anak tangga, dan jenis material yang dipakai untuk membuat tangga rumah tersebut, semuanya dibatasi dalam rangka memperkuat identitas budak di daerah pedalaman Minangkabau dan Tapanuli.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aminuddin bin Baki. 1966. "The Institution of Debt-Slavery in Reak". *Peninjau Sejarah*, Vol. 1, No. 1.
- Amran, Rusli. 1981. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anatona. 2007. "Perbudakan dan Perdagangan Budak di Kawasan Selat Malaka 1786 - 1880-an", Disertasi: Universitas Gadjah Mada.
- Castles, Lance. 2001. *Kehidupan Politik Satu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Couperus, P. Th. 1855. "De residentie Tapanoeili (Sumatra's Westkust)", *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde*, IV.
- Fang, Liaw Yock. 1976. *Undang-undang Melaka: The Laws of Melaka*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Galloo, Annabel Teh. 2003. "The Melaka Records in the British Library: Malay Documents in the Melaka Records", *International Convention of Asia Scholars - 3*, Singapore.
- Godon, A.P. 1862. "De assistent-residentie Mandaheling en Ankola, op Sumatra's Westkust, van 1847 tot 1857". *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, 24ste Jaargang, eerste deel.
- Gillick, J.M. 1965. *Indigenous Political Systems of Western Malaya*, London School of Economics Monographs on Social Anthropology No. 17. London: The Athlone Press.
- Kato, Tsuyoshi. 1989. *Nasab Ibu dan Merantau: Tradisi Ibu dan Merantau di Indonesia*. Penerjemah: Azizah Kasim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Kerckhoff, E.P. van. 1891. "Benige mededeelingen en opmerkingen betreffende de slavemij in Nederlandsch-Indië en hare afschaffing, speciaal wet betreft de afdeling Padang Lawas op Sumatra", *De Indische Gids*, II
- Koloniaal verslag van 1876*.
- Koolhof, Sirtjo and Robert Ross. 2005. "Upas, September and the Bugis at the Cape of Good Hope: The Context of a Slave's Letter". *Archipel*, 70.
- Kroesen, R.H. 1904. "Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebeid; behoorende tot de residentie Oostkust van Sumatra". *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, deel XVI.
- Loeb, Edwin M. 1972. *Sumatra: Its History and People*. New York: Oxford University Press.
- Manguin, P.Y. 1983. "Manpower and Labour Categories in Early Sixteenth Century Malacca", dalam Anthony Reid (ed.): *Slavery, Bondage, and Dependency in Southeast Asia*. St. Lucia: University of Queensland.
- Matheson, Virginia and M.B. Hooker. 1983. "Slavery in the Malay Texts: Categories of Dependencies and Compensation" dalam Anthony Reid (ed.). *Slavery, Bondage, and Dependency in Southeast Asia*. St. Lucia: University of Queensland.
- Maxwell, W.E. 1890. "The Law Relating to Slavery among the Malays". *Journal of the Straits Branch Royal Asiatic Society* 22.
- Mnsji, Abdullah bin Abdulkadir. 1958. *Sedjarah Melaju*. Jakarta: Djaribatan.
- Pistorius, Verkeik A.W.P. 1868. "Iets over de slaven en de afstammelingen van slaven in de Padangsche Bovenlander". *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*.
- Raben, Remco. 1996. "Batavia and Colombo: The Ethnic and Spatial Order of Two Colonial Cities 1600-1800". Disertasi. Rijksuniversiteit Leiden.

- Reid, Anthony. 1993. "The Decline of Slavery in Nineteenth Century Indonesia", dalam Martin A. Klein (ed.): *Breaking the Chains: Slavery, Bondage, and Emancipation in Modern Africa and Asia*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Sidjabat, W. Bonar. 1982. *Ahu Sisinga-mangaraja: Arti Historis, Politis, Ekonomis, dan Religius Sisingamangaraja XII*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sullivan, Patrick. 1982. "Social Relations of Dependence in A Malay State: Nineteenth Century Perak" . *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Monograph No. 10.
- Sumatra Factory Records*, Paket V Bundel XXX No. 1246-1316.
- Thomaz, Luís Filipe F. Reis. 2000. *Early Portuguese Malacca*. Diterjemahkan ke Bahasa Inggris oleh Fr. Manuel Pintado. Macau: CIMCD Polytechnic Institute of Macau.
- Vergouwen, Jacob C. 1964. *The Social Organization and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra*. Trans. Jeune Scott-Kenball. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Willinck, G.D. 1909. *Het rechtsleven bij de Minangkabausche Maleiers*. Leiden: E.J. Brill.